



Buletin Parlementaria

Nomor 1170/IV/X/2021 • Oktober 2021



Paripurna DPR Tetapkan Lodewijk Freidrich Paulus Sebagai Wakil Ketua DPR



3 Pemindahan IKN
Perlu Persiapan
Matang Dari Aspek
Regulasi



22 RUU Landas
Kontinen Optimalkan
Kepentingan
Nasional



9 772614 339005



BULETIN

Paripurna DPR Tetapkan Lodewijk Freidrich Paulus Sebagai Wakil Ketua DPR

Rapat Paripurna DPR RI menetapkan Lodewijk Freidrich Paulus sebagai Wakil Ketua DPR RI

Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) dari Fraksi Partai Golkar sisa masa jabatan 2019-2024. Penetapan tersebut sekaligus persetujuan pergantian M. Azis Syamsuddin yang mengundurkan diri dari jabatan sebagai Pimpinan DPR RI.

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyampaikan, Pimpinan Dewan telah menerima surat dari Dewan Partai Golkar Nomor B 663 Tanggal 28 September 2021 perihal persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Pimpinan DPR RI dari Fraksi Partai Golkar sisa masa jabatan 2019-2024.

“Sesuai dengan keputusan rapat konsultasi rapat Bamus tanggal 20 September, maka surat tersebut akan diagendakan rapat paripurna hari ini. Berdasarkan peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang mengatur tata cara pemberhentian Pimpinan DPR karena mengundurkan diri dari jabatan Pimpinan DPR, maka perlu menetapkan pemberhentian saudara M. Azis Syamsuddin dari Jabatan Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam. Apakah dapat disetujui?” kata Puan saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (30/9).

Setelah mendapatkan persetujuan Anggota Dewan, upacara pelantikan dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan Lodewijk Freidrich Paulus sebagai Wakil Ketua DPR RI dipandu Ketua Mahkamah Agung M Syarifuddin. “Demi Allah saya



Foto bersama Pimpinan DPR RI usai pengambilan sumpah jabatan oleh Lodewijk Freidrich Paulus sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) dalam Rapat Paripurna DPR RI. Foto: Jaka/nvl

bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ikrar Lodewijk.

Pengambilan sumpah Lodewijk disaksikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, serta tiga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel dan Abdul Muhaimin Iskandar. Puan berharap bergabungnya Lodewijk Paulus di Pimpinan DPR RI dapat memperkuat tugas-tugas konstitusional kedewanan. “Semoga dengan bergabungnya saudara Lodewijk akan memperkuat tugas konstitusional dewan,” harap politisi PDI-P itu.

Dalam kesempatan yang sama,

Puan juga menyampaikan terima kasih kepada M. Azis Syamsuddin atas pengabdiannya saat menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI. “Kepada saudara M. Azis Syamsuddin kami sampaikan terima kasih atas pengabdianya selama menjabat Wakil Ketua DPR RI,” pungkask perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Dengan begitu, susunan susunan pimpinan DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024 menjadi sebagai berikut Ketua Dr. (H.C.) Puan Maharani (A-188) dari Fraksi PDI-P, Wakil Ketua Korpolkam Lodewijk F. Paulus (A-281) dari Fraksi Golkar, Wakil Ketua Korekku Sufmi Dasco Ahmad (A-199) dari Fraksi Gerindra, Wakil Ketua Korinbang Rachmat Gobel (A-141) dari Fraksi NasDem, Wakil Ketua Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (A-44) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. ■ ann/es

Pemindahan IKN Perlu Persiapan Matang dari Aspek Regulasi



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad usai menerima Surpres RUU IKN dari Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Mensesneg Pratikno. Foto: Eno/IMV

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengungkapkan, rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) sudah ada sejak lama. Dia pun mengingatkan, pemikiran pemindahan Ibu Kota Negara ke tempat yang lebih baik sudah disampaikan oleh presiden pertama RI, Soekarno.

“Yang kami harapkan dari pemerintah dalam merencanakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) adalah perlunya sosialisasi dan persiapan yang matang terkait pembangunan Ibu Kota Baru yang meliputi aspek regulasi, sampai hal-hal teknis yang semua proses itu dikoordinasikan dengan DPR RI,” papar Puan saat konferensi pers di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/9).

Puan mengungkapkan, dirinya didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, DPR RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) tentang RUU Pemindahan Ibu Kota Negara dari pemerintah yang

disampaikan oleh Mensesneg Pratikno dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Ruang Pimpinan DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (29/9).

Surat tersebut diterima langsung oleh Puan, dia memberikan sejumlah catatan terkait rencana pemindahan IKN. “DPR RI sejalan dengan pemerintah tentang perlunya pemindahan Ibu Kota Negara. Apakah kemudian pernah ada negara yang memindahkan ibu kotanya? Banyak,” kata politisi PDI-P itu.

Lebih lanjut, Puan mengatakan, sosialisasi secara komprehensif harus dilakukan dengan masif ke publik tentang perlunya pemindahan Ibu Kota Negara, dari sisi ekonomi, sosial dan efektivitas pemerintahan. Termasuk mensosialisasikan tahapan-tahapannya dan skema pembiayaannya. “Kami akan melaksanakan proses tersebut melalui proses mekanisme yang ada pada waktu yang akan kami sepakati dalam rapat pimpinan,” pungkas Puan. ■ eko/es



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN REDAKSI

Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Medsos dan Website)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiaryah

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Rizka Arinindy, S.Sos, Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Ridwan Budiman, S.I.P, Agung Hidayat, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destiantis, S.I.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus

FOTOGRAFER

Prima Danutirto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Anief Rachman, R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Ople, Hasri Mentari

ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Natasya Amanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widyowati, Rosnita

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

PHOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

IT MEDIA DIGITAL

Muhammad Hendar Assifa, S.Kom

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eny Sulistiwati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Isfandi Mulyana, Yudi Kresna, Muhammad Ali, Mulus Karyadi,

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif Surachman, Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunnisa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO

DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Komisi II Apresiasi Pelaksanaan Tes Seleksi CASN di Medan

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengapresiasi jajaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Sumatera Utara yang telah menyelenggarakan ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2021 dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Indikatornya adalah adanya *social distancing*, pemakaian masker, dan penyediaan *hand sanitizer* di lokasi ujian SKD CASN yang digelar di Kodam I/Bukit Barisan dan Kantor Regional (Kanreg) VI BKN Medan.

“Tentu kita bersama-sama melihat bagaimana BKN menyelenggarakan tes CPNS dan kita sudah melihat langsung ke Kodam dan Kanreg VI secara protokoler sudah memenuhi syarat (prokes). Sudah diterapkan secara protokol prokes tentu kita apresiasi,” jelas Junimart usai memimpin peninjauan dan pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan Kepala Kanreg VI BKN Medan di Medan, Sumut, Rabu (22/9)

Junimart juga menuturkan, BKN telah melaksanakan ujian Seleksi CASN



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat meninjau pelaksanaan ujian CASN di Medan. Foto: Novel/nvl

dan PPPK secara modern dengan adanya *live score* hasil tes *Computer Assisted Test* (CAT) SKD CASN pada laman Youtube masing-masing Kanreg BKN sebagai tempat lokasi tes yang bisa dilihat serta dipantau secara real time. Melalui *live score* tersebut, peserta bisa memprediksi apakah dirinya bisa lolos ke tahap ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) atau tidak.

Politisi PDI-Perjuangan ini kembali mengapresiasi BKN terkait penempatan

lokasi tes Seleksi CPNS. Lokasi tempat ujian disesuaikan dengan lokasi terdekat dari alamat domisili para pelamar/peserta. Walaupun di sisi lain, terdapat sejumlah instansi yang tidak memperbolehkan peserta untuk memilih lokasi ujian. “Misalnya saya adalah CPNS untuk di daerah Makassar tapi saya bisa tes di Medan dan itu *online*, ini kan suatu pekerjaan yang luar biasa dan sangat kita apresiasi,” tutup legislator dapil Sumut III itu. ■ nvl/sf

Tertib dan Teratur, Komisi II Apresiasi SKD CASN 2021

Komisi II DPR RI melaksanakan pengawasan terkait Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun 2021. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengapresiasi penerapan kegiatan yang berjalan

tertib dan teratur sesuai peraturan di tengah pandemi Covid-19.

“Kita tentu mengapresiasi apa yang sudah dilakukan dari tahap awal sampai terlaksananya seleksi yang telah dilakukan ini dapat berjalan baik, tertib, rapi, dan teratur,” ungkap Saan usai memimpin Tim Kunjungan Kerja

Spesifik Komisi II DPR RI meninjau pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CASN di Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta, Rabu (22/9).

Melalui kunjungan tersebut, Anggota Fraksi Nasional Demokrat DPR RI itu turut ingin memastikan

Komisi II Soroti Pelaksanaan Seleksi CASN 2021 di Palembang



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi II DPR RI di Kantor Regional VII BKN Palembang. Foto: Tasya/nvl

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal menyoroti beberapa masalah yang muncul dalam penyelenggaraan tes Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di

Regional VII BKN Palembang, meliputi Provinsi Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Masalah pertama yang disoroti adalah ketersediaan jaringan internet yang kurang memadai karena luasnya wilayah Regional VII. Selain itu,

kerusakan kabel laut milik Telkom dan Telkomsel yang terjadi beberapa waktu lalu juga menjadi salah satu faktor yang menghambat proses pelaksanaan seleksi CASN.

“Masalah ketersediaan internet itu

yang tidak merata karena wilayahnya ini memang terlalu luas juga menjadi persoalan yang dihadapi dalam proses CPNS ini. Secara struktural inilah yang memang jadi kendala di beberapa tempat. Di tempat lain juga saya kira masalahnya sama, apalagi belakangan ini gangguan internet sebagaimana kita ketahui ada gangguan jaringan kabel di bawah laut,” ujar Syamsurizal usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi II DPR RI dengan perwakilan Pemprov Sumsel, Kepala Kanreg VII BKN Palembang, dan Kepala BKD Sumsel, di Kantor Regional VII BKN Palembang, Sumsel, Rabu (22/9).

Selain masalah jaringan internet, politisi PPP ini juga mendengar banyaknya masyarakat yang mempersoalkan nilai ambang batas atau *passing grade* kelulusan CAT SKD yang dinilai terlalu tinggi. Ia melihat tinggi rendahnya nilai *passing grade* bersifat relatif.

“Kalau kita katakan di Jakarta, tidak bisa orang Jakarta mengatakan ini *passing grade*-nya tinggi karena untuk Jakarta itu memang ya standarnya harus tinggi karena mereka kota besar, ibu kota negara. Sementara kalau *testing* itu ada di daerah provinsi itu pun berkelas juga. Ada provinsi kelas A ada provinsi kelas B barang kali seperti itu. Ada juga provinsi yang memang jauh di sana itu juga perlu penyesuaian *passing grade* yang kita katakan perlu diafirmasi dengan kondisi yang ada,” jelas Syamsurizal. ■ nap/sf



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa saat meninjau pelaksanaan SKD CASN di Kantor Regional I BKN Yogyakarta. Foto: Saum/nvl

bahwa seleksi CASN ini berjalan dengan transparan, objektif, dan akuntabel. Hal ini menjadi vital guna meminimalisir subjektivitas agar tidak mengakibatkan korupsi, nepotisme, dan kolusi.

“Apa yang telah dilakukan seleksi CASN ini, mempengaruhi masa depan bangsa. Kita ingin mendapatkan ASN yang benar-benar berintegritas, kredibel, punya kompetensi, dan membawa perubahan yang jauh lebih baik,” imbuh legislator dapil Jawa Barat VII tersebut.

Menghasilkan CASN berkualitas memang menjadi perhatian Komisi II DPR RI. Saan menyakini seleksi CASN ini telah menggunakan cara yang sangat baik ini.

Dirinya pun menegaskan optimisme telah hadir dalam pelaksanaan seleksi tersebut. Sehingga, harapannya dari tahapan seleksi ini akan lahir para bibit CASN Tahun 2021 yang lebih unggul dan turut andil membangun bangsa yang lebih baik. ■ ts/sf

Komisi IV Usul Lahan Bekas Karhutla Dapat Dimanfaatkan oleh Masyarakat



Anggota Komisi IV DPR RI Sutrisno saat mengikuti pertemuan Tim Kunspek Komisi IV DPR RI dengan jajaran Kementerian LHK dan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai di Majalengka, Jawa Barat. Foto: Kiki/nvl

Anggota Komisi IV DPR RI Sutrisno mengusulkan agar lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, minimal oleh anggota Masyarakat Peduli Api (MPA). Menurut Sutrisno, MPA bisa diberikan fasilitas seperti Kebun Bibit Rakyat (KBR) dan Pengembangan Perhutanan Sosial Nusantara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atau yang dikenal dengan 'Bang Pesona'.

Sutrisno menjelaskan KBR dimaksud adalah pemerintah untuk menyediakan bibit tanaman kayu-kayuan atau tanaman serbaguna (MPTS) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mendukung

Komisi IV Soroti Pentingnya Perda Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat

Komisi IV DPR RI menyoroti pentingnya perhatian pemerintah daerah (pemda) kepada masyarakat adat dalam membuat Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.

"Salah satu yang menjadi prasyarat untuk mengakui kehadiran masyarakat

adat di area konservasi atau pun area lindung atau area kawasan hutan, adalah pemerintah daerah harus membuat peraturan daerah," ujar Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka saat mengikuti Kunjungan Spesifik Panitia Kerja (Panja) RUU KSDAE Komisi IV DPR RI di Pendopo Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (24/9).



Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka. Foto: Rizki/nvl

Politisi Partai Demokrat itu menilai, masyarakat adat di Indonesia sangat

pemulihan fungsi hutan dan lahan kritis serta kegiatan penghijauan lingkungan.

“Saya mengusulkan agar lahan bekas kebakaran ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, minimal oleh anggota MPA,” kata Sutrisno usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI dengan jajaran KLHK, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Bupati Majalengka, serta MPA, di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Jumat (24/9).

Sementara diketahui, ‘Bang Pesona’ adalah bentuk upaya pemerintah untuk memberikan modal usaha kepada masyarakat. Bantuan ini diharapkan dapat mendorong agar masyarakat bisa menjalankan usaha Perhutanan Sosial hingga memberikan nilai tambah bagi produk mereka. Sehingga ekonomi masyarakat pun, akan mampu bertahan di saat melemahnya ekonomi global karena serangan pandemi Covid-19.

“Hanya dengan cara seperti (pemanfaatan lahan oleh masyarakat) itu, lahan yang masih aman bisa teramankan, lahan yang terbakar bisa dilestarikan kembali. Jadi atensi bisa tercapai, uang negara juga bisa dihemat, tapi rakyat diberdayakan,” usul Anggota DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan itu menutup pernyataannya. ■ qq/sf

memerlukan pengakuan hak terutama atas tempat tinggalnya.

Senada, Anggota Komisi IV DPR RI T.A Khalid mengatakan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat sangat penting karena memiliki kaitan erat dengan upaya melindungi ekosistem alam yang saat ini menjadi perhatian utama Komisi IV DPR RI.

Diketahui Kabupaten Sukabumi telah memiliki Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang mengatur pengakuan hak masyarakat adat. Namun, kebijakan tersebut belum didukung dengan adanya perda yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi. ■ rr/sf

Komisi IV Minta Pemerintah Cari Solusi Konkret Persoalan Pupuk

Kabupaten Pandeglang memiliki potensi yang cukup luas di sektor pertanian. Namun, seperti daerah lainnya di Indonesia, sektor pertanian di daerah yang dipimpin Bupati Pandeglang Irna Nurlina tersebut tak luput dari berbagai persoalan, di antaranya terkait kelangkaan pupuk, sulitnya petani untuk mengakses Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) melalui Kartu Tani hingga alsintan yang masih belum mencukupi.

Anggota Komisi IV DPR RI Nur’aeni menjelaskan, khusus persoalan pupuk, masih menjadi problematika yang dihadapi sektor pertanian. Pemerintah pun diminta untuk mencari solusi konkret atas hal itu. “Sebetulnya kunci dari kesuksesan produksi dan produktifitas pertanian itu kan di samping dari sisi irigasi, pupuk juga jadi kunci utama dalam rangka mewujudkan produksi dan produktifitas pertanian yang tinggi,” ucapnya saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat (24/9).

Melihat kondisi tersebut, Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu merasa pemerintah perlu memberikan *support* atau bantuan kepada para petani agar dapat meningkatkan produksinya. “Kepada Dirjen (Kementerian Pertanian) terkait agar bisa memberikan bantuan alsintan, benih ikan dari KKP, serta bantuan-bantuan lain yang mungkin kami nilai dan kami rasa perlu diberikan kepada petani,” tuturnya.

Tak serta merta melihat pentingnya bantuan untuk petani khususnya di



Anggota Komisi IV DPR RI Nur’aeni bertukar cenderamata dengan Bupati Pandeglang. Foto: Fitri/nvl

Kabupaten Pandeglang, Nur’aeni menilai keterbatasan anggaran dari kementerian dan para *stakeholder* dikarenakan adanya *refocusing* anggaran selama pandemi Covid-19 menjadi kendala dalam pemberian bantuan kepada petani. Legislator daerah pemilihan (dapil) Banten II itu merasa hal tersebut erat kaitannya dengan kuantitas bantuan yang diberikan.

“Programnya sebetulnya ada, tapi keterbatasan inilah menjadi kendala. Kita mendorong juga, ke depan kalau Covid-19 segera berlalu, diharapkan para mitra kami dalam melakukan penyusunan rencana bisa kembali normal, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dari program-program yang digulirkan nanti seperti pada alsintan, benih ikan, bibit maupun pupuk,” harap Nur’aeni kepada mitra kerja. ■ srw/sf

Komisi V

Dukung Pengembangan Kawasan Transmigrasi Telang

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie mengapresiasi

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) serta Pemerintah Kabupaten Banyuwangi atas upaya pengembangan Kawasan Transmigrasi Telang menjadi Kawasan yang berdaya saing.

“Alhamdulillah, transmigrasi Telang di Kabupaten Banyuwangi sangat baik. Kawasan transmigrasi telang ini harus menjadi pilot *project* untuk percepatan revitalisasi daerah transmigrasi menuju kawasan yang berkembang dan maju,” ungkap Syarif saat memimpin Tim Kunspek Komisi V DPR RI ke Kawasan Transmigrasi Telang, Banyuwangi, Sumatera Selatan, Rabu (22/9).

Syarif menyampaikan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi merupakan salah satu instrumen penting untuk mendorong pembangunan desa dan penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa. Dimana, pembangunan transmigrasi harus dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya, membentuk kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang dirancang secara holistik sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

“Selain itu, pembangunan kawasan transmigrasi harus diarahkan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan baru dan mendorong daya saing daerah,” ungkap politisi Partai NasDem tersebut.



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie . Foto: Ria/nvl

Di era desentralisasi, lanjutnya, dengan menganut asas otonomi dan tugas pembantuan, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang lebih besar pada proses pelaksanaan transmigrasi. “Oleh karena itu, sangat penting peningkatan sinergi antara Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, peran gubernur bersama dengan bupati dalam memajukan dan menentukan wajah transmigrasi ke depan, ke arah yang lebih baik,” tutur Syarif.

Di tempat yang sama, Bupati Kabupaten Banyuwangi Askolani Jasi menyampaikan, program transmigrasi di Kabupaten Banyuwangi telah berlangsung sejak Tahun 1969 sampai dengan Tahun 2017. Dan telah berhasil menempatkan 55.659 kepala keluarga atau 235.915 jiwa di 129 UPT Binaan. ■ rnm/es



Anggota Komisi V DPR RI Sumail Abdullah. Foto: Agung/nvl

Anggota Komisi V DPR RI Sumail Abdullah berharap Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Desa Wisata Sanankerto, Kabupaten Malang, kali ini dapat memastikan

Komisi V Dorong Kemendes Optimalkan Padat Karya Serap Tenaga Kerja

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mendorong Kementerian Desa PDTT dapat terus membuka lapangan pekerjaan baru. Terutama, untuk mengakomodir segenap masyarakat yang terpaksa menjadi pengangguran akibat dampak pandemi Covid-19 agar dapat diserap kembali dalam program padat karya secara khusus di Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian disampaikan Andi Iwan usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi V DPR RI dengan Kepala BPSDM-PMDDTT Luthfiyah Nurlela, Sekretaris BSPDM-PMDDTT Jajang Abdullah dan Kepala Balai Pelatihan PMDDTT di Balai Pelatihan dan PMDDTT Makassar, di Makassar Sulawesi Selatan, Rabu (22/9).

"Pada prinsipnya, Komisi V DPR RI dalam menyikapi masih

berlangsungnya situasi pandemi Covid-19 saat-saat ini tentu kami berharap pemerintah khususnya melalui Kementerian Desa dan PDTT dapat terus membuka lapangan pekerjaan baru. Terutama, untuk mengakomodir masyarakat yang terpaksa menjadi pengangguran akibat dampak pandemi Covid-19 supaya dapat diserap kembali dalam padat karya," ujar Andi Iwan.

Politisi Partai Gerindra tersebut mengusulkan agar dalam program-program padat karya dapat diisi oleh tenaga-tenaga kerja yang belum terakomodir di program-program lainnya. Maka, para pendamping desa yang sudah ada tidak lagi menjadi pendamping-pendamping kegiatan di program-program padat karya lainnya. Sehingga dengan demikian, lapangan kerja dapat terbagi secara merata kepada masyarakat bawah.

Andi Iwan juga menyoroti SDM di



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras.
Foto: Puntho/nvl

Balai Pelatihan dan PDTT yang tercatat hanya sejumlah 60 personel, namun mencakup wilayah yang begitu besar. "Terkait hal itu, kami mendorong Balai Pelatihan Makassar mendapatkan tambahan SDM dan fasilitas. Di samping itu, Komisi V mendorong balai kecil ini menjadi balai besar. Serta, menambah balai lain di daerah lain agar beban kerja Balai Pelatihan dapat diringankan," tandas Andi Iwan. ■ pun/sf

Legislator Dorong Ketetapan Lahan Desa Wisata Sanankerto

pemfasilitasian ketetapan lahan desa tersebut. Sebelumnya pihak desa wisata mengeluhkan adanya wilayah lahan yang masih diklaim Perum Perhutani.

Sumail tak menampik bahwa di beberapa wilayah klaim semacam itu masih terjadi. "Lewat kunjungan kami kali ini ingin memastikan dan sekaligus konsolidasi *stakeholder* terkait yakni Kemendes agar memfasilitasi dari sisi

ketetapan lahan mulai diserahkan ke Desa Sanankerto," ujarnya di sela-sela kunjungan ke Desa Wisata Sanankerto, Malang, Jawa Timur, Rabu (22/9).

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI kali ini dalam rangka meninjau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Desa Wisata Sanankerto Kabupaten Malang. Dalam kunjungan ini turut hadir pula jajaran pejabat Direktorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

BUMDes Desa Wisata Sanankerto tergolong sukses dan mandiri, dimana kata Sumail dengan modal sekitar Rp170 juta mampu menyumbang bagi Pendapatan Asli Desa hingga Rp400 juta dan lebih setiap tahunnya. "Harapannya BUMDes ini perlu dicontoh oleh BUMDes-BUMDes lain di seluruh Indonesia," sebut legislator dapil Jawa Timur III itu.

Namun di samping prestasi yang dicapai, Sumail mencermati masih ada persoalan yang menjadi perhatian terkait pengelolaan wisata, salah satunya yaitu permasalahan sampah, dimana setiap hari sampah organik dan anorganik menumpuk. "Tentu perlu difasilitasi Tempat Pembuangan Sampah Akhir," pungkasnya. ■ ah/sf

Komisi VI Tinjau Pengembangan UMKM di Banten



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima. Foto: Gerald/nvl

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan, Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 7 Tahun 2021 mengamanatkan perusahaan BUMN memberikan ruang promosi yang lebih besar kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), supaya *recovery* ekonomi pasca-pandemi bisa berjalan. BUMN diharapkan menjadi *leading sector* untuk pemulihan ekonomi dengan mengajak berbagai pelaku ekonomi, termasuk UMKM.

Saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Kantor Cabang Merak, Banten, Kamis (23/9), Aria Bima menilai kolaborasi antar BUMN dan UMKM terlihat begitu kental di Pelabuhan ASDP Merak. Infrastruktur yang disediakan akan membuat UMKM berkembang bersama-sama dengan pengembangan wilayah di Pelabuhan Merak, maupun pelabuhan lainnya.

“Saya mengapresiasi *grand*

design dari ASDP, khususnya di Merak, yang tidak hanya melibatkan, dengan menjadikan satu kesatuan pengembangan ini dengan pengembangan UMKM di sekitar wilayah Banten. Dan saya berharap hal serupa menjadi *pilot project* untuk BUMN-BUMN lainnya yang tugasnya membina pelaku UMKM itu,” kata politisi PDI-P itu.

Senada dengan Aria Bima, Anggota Komisi VI DPR RI Ananta Wahana memberikan apresiasi terhadap pengembangan Pelabuhan Merak. Menurut Ananta, langkah ASDP menyulap penampilan Pelabuhan Merak secara revolusioner, telah mengubah kesan seram, kumuh serta jorok pelabuhan yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa

tersebut.

“Dulu, dalam setiap tahun bisa dua sampai tiga kali, menjadi penyumbang kemacetan luar biasa. Selain itu juga kumuh, menyeramkan, bahkan menjadi tempat duel para preman. Tapi saat ini sudah tertata dengan bagus, bersih, dan nyaman,” ujar legislator daerah pemilihan (dapil) Banten III ini.

Dengan kondisi Pelabuhan Merak dan Bakauheni yang kini sudah tertata rapi, Ananta turut mempertanyakan kesiapan ASDP terhadap implementasi PP Nomor 7 Tahun 2021, baik secara anggaran maupun teknis penataan pedagang, terutama peran ASDP dalam memberdayakan UMKM di wilayah itu.

Menurutnya, di daerah Cilegon-Serang memiliki banyak UMKM sebagai tulang punggung perekonomian. “Sebanyak 65 persen APBD Banten dari UMKM. Tetapi saat pandemi Covid-19 ini, pertumbuhannya mengalami kontraksi sampai minus satu persen yang biasanya pertumbuhannya lima hingga enam persen, sehingga banyak UMKM yang berguguran, dengan adanya PP 7 Tahun 2021 ini, dia ingin memastikan kalau nantinya UMKM rakyat yang ditampung oleh ASDP di Pelabuhan Merak ini,” tandas Ananta. ■ **opi/sf**

PNM Mekaar Berperan Strategis Memberdayakan Masyarakat

Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Toha menilai PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar) dinilai memiliki peran strategis dalam memberdayakan masyarakat. Dirinya mengimbau PNM melalui program Mekaar dapat menjaga keberlanjutan ekspansi, di dalam memberikan pinjaman

kepada masyarakat. Diketahui PNM meluncurkan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro melalui program Mekaar yang dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok.

“Saya menilai program Mekaar oleh PNM ini sangat efektif ya sebagai akses pembiayaan modal

Pembangunan Infrastruktur Tol Harus Bermanfaat bagi Masyarakat

Anggota Komisi VI DPR RI Daeng Muhammad

menegaskan esensi pembangunan infrastruktur jalan tol adalah bagaimana nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat setempat. Ia mengatakan bahwa tujuan Presiden Joko Widodo mempercepat infrastruktur untuk menekan biaya akomodasi agar terjangkau, sehingga pengangkutan barang dari satu daerah ke daerah lainnya bisa diterima dengan mudah.

“Yang menjadi fokus paling mendasar dalam pembangunan infrastruktur jalan tol ini ialah tentang bagaimana nantinya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Namun, oleh karena moda transportasi yang mudah diakses, apakah tujuan ini sudah tercapai atau tidak, kita belum bisa pastikan. Hal ini perlu dijadikan evaluasi



Anggota Komisi VI DPR RI Daeng Muhammad. Foto: Dipa/nvl

dengan PT Jasa Marga,” pungkas Daeng saat mengikuti Kunspek Komisi VI DPR RI ke Karawang, Jawa Barat, Kamis (23/9).

Dalam pertemuan dengan jajaran PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Jasa Raharja (Persero) tersebut, Daeng ingin masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat diberikan lokasi usaha di *rest area* sekitar ruas jalan tol, segera diberikan tempat untuk memulai usahanya disana.

Perlu dibuatkan tempat khusus yang lebih strategis kepada UMKM dan penempatan bisa dijangkau dengan mudah oleh pengunjung.

“Ada ketentuan dimana *rest area* sebanyak 30 persen ditempati oleh UMKM kita. Kenapa aturan ini ada? Karena aturan ini ditetapkan ketika Trans Tol Jawa ini dibangun. Imbasnya ada pengusaha UMKM kita yang dulunya di pinggir jalan Pantura itu tergeser. Oleh karena itu, pemerintah perlu merelokasi usaha masyarakat untuk bisa masuk ke *rest area* sepanjang tol. Selain itu, mereka harus mengakomodir dan bisa menempatkan UMKM di tempat yang lebih strategis dan bisa menjadi fokus pengunjung untuk membeli,” tuturnya.

Politisi PAN itu mendorong agar aturan ini disosialisasikan mendalam kepada masyarakat setempat.

Memang penetapan 30 persen *rest area* untuk UMKM ini berlaku untuk seluruh jenis jalan tol. “Ruang usaha pada *rest area* diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar. Hal ini sekaligus mendekatkan dunia usaha (UMKM) dengan konsumen untuk mempromosikan *brand* dan produk lokal, termasuk kuliner,” tutup legislator daerah pemilihan Jawa Barat VII itu. ■ dip/sf



Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Toha. Foto: Tiara/nvl

kerja untuk mendirikan usaha tertentu. Menysasar kaum Ibu-ibu, saya pikir jelas mereka akan bisa berdaya,” jelas Toha usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI

DPR RI ke Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Kamis (23/9).

Anggota Fraksi PKB DPR RI itu mengimbau, diperlukan ekspansi perluasan jangkauan para nasabah hingga ke pelosok-pelosok daerah. Sehingga nantinya masyarakat yang sudah menjadi nasabah dan usahanya sudah berhasil bisa mengajak masyarakat lain. Menurut Toha, PNM melalui program Mekaar ini menjadi sebuah simbol dan program yang berhasil menjauhkan masyarakat dari pinjaman-pinjaman *online*.

“Karena kalau PNM merupakan bantuan pinjaman biaya usaha secara bertahap tanpa agunan dengan bunga rendah, meskipun harus berkelompok. Hal ini untuk menghindarkan mereka

dari pinjaman *online*. Sekarang banyak masyarakat yang *kepepet*, tertipu dengan pinjaman *online* akhirnya bunga tinggi, tidak bisa membayar atau menyicil utangnya itu. Program PNM Mekaar ini sangat strategis dalam memperdayakan masyarakat,” tutur legislator dapil Jateng V itu.

Di samping itu, Toha berpesan kepada PNM agar para nasabah pelaku usaha bisa turut dijamin kesehatan hingga hari tua. “Semoga nantinya PNM bisa memprakarsai agar mereka bisa memperoleh jaminan kesehatan dan jaminan hari tua. Karena mereka membutuhkan kepastian usaha sampai dengan mungkin anak cucunya kelak,” harap Toha kepada jajaran PNM. ■ tra/sf

Komisi VII Dapatkan Gambaran Utuh Aktivitas Tambang Grasberg



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR RI ke PT Freeport Indonesia di Mimika, Papua. Foto: Devi/nvi

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengatakan, Komisi VII telah mendapatkan gambaran yang utuh mengenai aktivitas secara keseluruhan di Tambang Grasberg yang dikelola PT Freeport Indonesia (PTFI). Maman menyampaikan, kondisi Tambang Grasberg saat ini sudah berhenti beroperasi secara penambangan terbuka. Metode pertambangannya berubah menjadi penambangan bawah tanah (underground mining).

“Kita apresiasi setinggi-tingginya kepada PT Inalum dan PT Freeport Indonesia karena hampir seratus persen karyanya dilakukan oleh anak bangsa,” ucap Maman saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR RI ke PT Freeport Indonesia, di Kabupaten Mimika, Papua, Sabtu (25/9).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menegaskan, Komisi VII DPR RI akan

terus mendorong PTFI untuk bersama-sama dengan PT Inalum dapat mengembangkan potensi tambang yang ada di Freeport.

“Kalau melihat dari potensi tambang yang ada, sebetulnya masih panjang aktivitas yang masih bisa dilakukan, yakni lebih dari 50 tahun.

Artinya masih punya prospek besar ke depan. Oleh karenanya, Komisi VII akan

terus mendorong dan men-*support* hal-hal yang memang kita anggap bisa melancarkan proses pengembangan di lapangan ini,” ujarnya.

Dikatakannya, Komisi VII DPR RI berharap, apapun yang dilakukan oleh PTFI, maka kepentingannya harus mengacu pada kepentingan nasional. Bisa memberikan kemanfaatan yang setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya bagi negara. Baik buat pendapatan negara dari segi royalti, PNBPN, dan juga bagi masyarakat setempat.

“Dan kita juga banyak mendapat laporan bahwa program CSR (corporate social responsibility) PT Freeport cukup berjalan optimal. Baik di seputar wilayah area penambangan dan juga di seluruh Provinsi Papua,” ungkapinya.

Sementara itu Presiden Direktur PTFI Tony Wenas dalam paparannya menyatakan betapa pentingnya keberadaan perusahaan tambang berkelas dunia yang sekarang mayoritas sahamnya dimiliki Indonesia.

“(Kepemilikan saham) 51,2 persen, dan kita perlu berbangga bahwa ada tambang kelas dunia yang dimiliki oleh Indonesia. Keberadaan kami di sini juga harus memberikan manfaat, bukan hanya bagi negara tetapi juga bagi masyarakat di sekitar kami,” kata Tony kepada Komisi VII DPR RI. ■ dep/es

Komisi VII Minta Pemerintah Dukung PT Semen Bosowa Maros

Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam memaparkan, industri semen saat ini tengah tertekan, salah satunya karena lonjakan harga batu bara yang cukup signifikan. Oleh karenanya, ia meminta pemerintah untuk memberikan arahan dan dukungan bagi industri semen, terlebih di situasi pandemi saat ini yang semakin

menurunkan tingkat konsumsi terhadap semen.

“Pemerintah harus mempersiapkan, salah satunya dengan *Domestic Market Obligation* (DMO) untuk kebutuhan pabrik-pabrik semen,” papar Ridwan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT. Semen Bosowa Maros, Sulawesi Selatan, Kamis (23/9).

Untuk diketahui, DMO merupakan kewajiban produsen batu bara domestik

Lembaga Riset Dilebur ke BRIN, Komisi VII Kunjungi P3Tek KESDM

Komisi VII DPR RI meninjau Puslitbang Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (P3TKEBTKE/P3Tek), Kementerian ESDM, guna memantau implementasi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 yang mensyaratkan seluruh lembaga riset kementerian dan lembaga akan bergabung di bawah naungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek).

“Secara kelembagaan dan SDM seperti apa itulah yang kami telusuri. Peleburan menjadi BRIN tentunya tidak mudah, ada hal-hal yang memerlukan kecermatan. Dengan bergabungnya ke BRIN, kita berharap riset-riset dan penelitian yang ada jauh lebih baik dan maju,” kata Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI meninjau



Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat meninjau P3TKEBTKE/P3Tek. Foto: Andri/nvl

P3TKEBTKE/P3Tek Kementerian ESDM di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/9).

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengatakan, integrasi atau peleburan lembaga litbangjirap (penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan) ke dalam BRIN, konsekuensinya penelitian di badan, kementerian dan lembaga harus menjadi satu ke dalam BRIN.

Menurutnya, secara teori peleburan ini tidak secepat yang diinginkan, melainkan harus bertahap. Karena dalam peleburan kelembagaan ini yang akan pindah di antaranya SDM, anggaran, hingga fasilitas dan sarana

prasarana yang tentunya memerlukan waktu.

“Tidak serta merta fungsi ristek ini bisa dikerjakan oleh BRIN, minimal 3-4 tahun baru bisa berjalan baik. Kami juga mengecek langsung produk dan penemuan inovasi seperti apa yang dikembangkan Litbang P3Tek. Kita berharap riset-riset ini terus dikembangkan agar bisa bermanfaat bagi masyarakat,” harap Mulyanto. ■ man/sf



Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI meninjau aktivitas PT Semen Bosowa Maros. Foto: Ica/nvl

“Semestinya ada kebijakan makro dari pemerintah yang mengharuskan

untuk memasok produksi batu bara bagi kebutuhan dalam negeri. Ridwan menyampaikan jangan sampai seluruh batu bara diekspor, sehingga kebutuhan batu bara dalam negeri.

Permasalahan lainnya yang dihadapi oleh PT Semen Bosowa adalah mengenai pasar.

seluruh proyek-proyek pemerintah menggunakan semen dalam negeri, sehingga pabrik semen dalam negeri dapat terbantu. Terlebih sekarang juga banyak pabrik-pabrik semen dari Cina,” jelas politisi Partai Golkar itu.

Sebelumnya, Wakil Direktur Utama PT Semen Bosowa Maros Subhan Aksa menyampaikan keluhan terkait batu bara. Dimana, sekitar 70 persen semen terbuat dari batu bara, sedangkan harga batu bara tidak terkontrol (naik) dapat berpengaruh terhadap harga semen. “PT. Semen Bosowa harus menyesuaikan dengan permintaan. Tetapi, kalau harga terus naik, maka perusahaan juga harus melakukan penyesuaian,” ujar Subhan. ■ ica/es

Komisi VIII *Monitoring* Kesiapan PTM MAN 2 Kota Bandung



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka (kiri) saat memimpin Kunspek Komisi VIII DPR RI ke MAN 2 Kota Bandung guna meninjau kesiapan PTM. Foto: Azka/nvl

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menilai, pembelajaran tatap muka (PTM)

perlu dilakukan untuk menghindari kesenjangan pengembangan pendidikan. Karena kehadiran fisik memiliki fungsi yang lebih banyak

daripada pembelajaran daring atau *online* yang hanya bersifat transfer pengetahuan kognitif.

Hal ini disampaikan Diah usai pertemuan memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI dengan Kepala MAN 2 Kota Bandung, Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat beserta jajarannya dalam rangka pengawasan pembelajaran tatap muka di masa pandemi Covid-19 di Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (23/9).

“Pada PTM, pembelajaran tidak hanya bersifat pemberian pengetahuan kognitif, tetapi juga pembinaan aspek afektif dan juga psikomotorik sebagai aspek penting dalam proses pendidikan. Dari laporan WHO tahun 2021, penutupan sekolah memiliki dampak negatif yang jelas pada kesehatan anak, pendidikan, perkembangan, pendapatan keluarga dan perekonomian secara keseluruhan,” ujarnya.

Legislator dapil Jawa Barat III itu menambahkan, pelaksanaan vaksinasi untuk tenaga pendidik dan peserta didik harus segera dilakukan secara merata, sebagai upaya terciptanya *herd immunity*. Di sisi lain, penerapan protokol kesehatan di tiap-tiap sekolah

Komisi VIII Awasi Pengelolaan Bansos di Kendal

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori mengatakan Bantuan Sosial Tunai (BST) dari jumlah daftar 42.630 data calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, ada 11.441 data KPM harus diverifikasi dan divalidasi ulang karena terdapat data yang tidak valid dalam pengelolaan bansos.

“Jadi sebenarnya kami (Komisi VIII DPR) sudah melakukan suatu evaluasi untuk pemadanan data tersebut dan sudah mendapatkan laporan semalam,

kemudian Pemkab Kendal melakukan pemadanan data sampai *clear*,” kata Bukhori usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dengan Bupati Kendal Dico Ganinduto beserta jajaran, di Kendal, Jateng, Kamis (23/9).

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI itu menjelaskan, 11.441 data KPM tersebut sedang diproses dan BST belum disalurkan, namun bukan berarti BST itu tidak tersalurkan. Pada Mei-Agustus lalu, data KPM ini juga telah dievaluasi.



Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori dengan disaksikan Mensos menyalurkan bansos untuk Kabupaten Kendal. Foto: Chasbi/nvl

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa BST senilai Rp300 ribu per KPM tersebut haruslah tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan,

pun harus dilakukan secara ketat.

“Pelaksanaan penerapan pembelajaran tatap muka harus tetap mengedepankan protokol kesehatan, vaksinasinya pun untuk tenaga pendidik dan peserta didik harus merata agar tercipta kekebalan tubuh. Jangan sampai nanti setelah PTM dilaksanakan menjadi klaster Covid-19 baru di bidang pembelajaran,” pesan politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Diah menurutkan, dalam perencanaan PTM baik di madrasah maupun perguruan tinggi keagamaan harus dirancang dengan berbagai pertimbangan, dari mulai bagaimana pengawasan kepatuhan terhadap protokol kesehatan jika kebijakan tersebut diterapkan, mitigasi jika terdapat peserta didik yang terpapar, aspek anggaran dalam pemenuhan kebutuhan alat kesehatan, dan berbagai kebijakan lainnya agar tidak terjadi klaster baru penyebaran Covid-19 di kalangan pelajar.

Pada kesempatan ini, Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI menyaksikan penyerahan bantuan secara simbolis dari Kemenag untuk MAN 2 Kota Bandung berupa masker, *hand sanitizer*, dan *handsoap*. ■ *azk/es*

jangan sampai ada *misleading* data kembali. “Kebijakan bantuan sosial dimaksudkan untuk meringankan beban hidup yang dihadapi oleh masyarakat, lebih-lebih pada masa pandemi Covid-19. Namun masih terdapat permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial, misalnya data penerima manfaat yang tidak akurat, gagal salur, penyaluran tidak tepat waktu, dan pemotongan jumlah bantuan sosial. Dampaknya, capaian tujuan dari pelaksanaan bantuan sosial tidak maksimal,” jelas Bukhori.

Karenanya, legislator daerah pemilihan Jawa Tengah I itu mengingatkan, apabila terdapat permasalahan, seperti data tidak akurat dan lain sebagainya, maka harus dilakukan tindakan-tindakan perbaikan secepatnya. ■ *cas/sf*



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat memimpin Tim Kunspek Komisi VIII di Palembang. Foto: Ayu/nvi

Komisi VIII Tinjau Persiapan PTM Terbatas di UIN Radeh Fatah Palembang

Komisi VIII DPR RI memastikan persiapan rencana perkuliahan tatap muka (PTM) terbatas di UIN Radeh Fatah, Palembang. Pada kesempatan tersebut, Komisi VIII mengapresiasi berbagai kebijakan yang diambil oleh pihak kampus untuk membantu para mahasiswa di saat pandemi Covid-19.

“Kedatangan kami, Komisi VIII Ke UIN Radeh Fatah ini selain untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dari kampus ini untuk melaksanakan perkuliahan tatap muka terbatas,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat memimpin Tim Kunspek Komisi VIII ke UIN Raden Fatah, di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (22/9).

Selain itu, lanjut Marwan, pihaknya juga ingin mengetahui kebijakan yang diberlakukan oleh UIN Raden Fatah terhadap mahasiswanya yang terdampak pandemi Covid-19.

Dalam kesempatan itu, Rektor UIN Raden Fatah Nyayu Khodijah

menjelaskan bahwa perkuliahan tatap muka terbatas rencananya akan diberlakukan untuk mahasiswa semester 1, 3 dan mahasiswa yang sedang praktikum. Perkuliahan tatap muka terbatas itu diikuti maksimal 50 persen dari kapasitas ruangan, dan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Rektor UIN juga memaparkan berbagai kebijakan di antaranya kebijakan berupa perpanjangan masa studi kepada mahasiswa. Selain itu juga kebijakan berupa pengurangan dan pembebasan uang kuliah tunggal (UKT), yakni 10 persen bagi semua mahasiswa yang mengajukan, 80 persen bagi mahasiswa yang sudah tidak ada perkuliahan (tinggal skripsi).

Atas kebijakan tersebut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang dan seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI yang hadir dalam kunjungan tersebut, mengungkapkan apresiasinya, sambil berharap agar kebijakan tersebut terus diterapkan selama pandemi berlangsung. ■ *ayu/es*

Jawa Timur Bisa Menjadi Contoh Penerapan 3T Covid-19



Foto bersama Tim Kunspek Komisi IX DPR RI dengan jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Jatim. Foto: Eno/nvl

Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana menilai Provinsi Jawa Timur bisa menjadi contoh untuk semua provinsi di Indonesia dalam Penerapan 3T (Tracing, Testing dan Treatment) secara preventif untuk menghadang Covid-19.

“Kami harapkan yang telah dilakukan oleh Jawa Timur bisa menjadi contoh untuk semua provinsi di Indonesia, sehingga kita bisa menghadang lewat preventif *tracing* dan *testing*,” ujar Meli, sapaan akrabnya saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Dinas Kesehatan Jatim, di Surabaya, Jumat (24/9).

Menurut Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI itu, keberhasilan Jatim dalam mengendalikan Covid-19 adalah

melalui *tracing* dan *testing*, karena tidak semua daerah sukses dalam capaiannya. Bahkan Menteri Kesehatan mengatakan kendala

dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 itu tidak bisa hanya *tracing* dan *testing* secara masif.

“Jawa Timur bisa melakukan (*tracing* dan *testing*) itu, dengan cepat bisa pindah ke (PPKM) level 1 dari level 4, karena mereka membuat suatu komunikasi yang baik antara Pemda, Kemenkes, TNI, Polri dan masyarakat, serta koordinasi kemudian mereka memperbanyak sarana dan prasarana labnya,” apresiasi Meli.

Meli mengatakan, Komisi IX DPR RI kerap mendesak Kemenkes untuk melaksanakan *tracing* dan *testing* secara masif. Karena dua langkah merupakan salah satu tindakan pencegahan. “Dan kalau sudah *treatment*, berarti sudah sakit, sudah masuk ke kuratif, sedangkan kita lebih baik mencegah daripada mengobati, *tracing* dan *testing* adalah jalan mencegah,” tandas legislator dapil Sumatera Selatan II tersebut.

“Kalau menurut data yang kami terima, petugas *tracing* sekaligus bisa melakukan *testing*, sehingga ini tercatat didata bahwa mereka melakukan *tracing* dan *testing*. Sehingga dengan berani mereka menyatakan mereka sudah (PPKM) level 1, dan ini bisa menjadi garis besar pengendalian Covid-19 di Indonesia, seandainya pusat bisa melaksanakan ini, memperbanyak lab,” pungkas Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tersebut. ■ eno/sf

Pemda Harus Segera Ambil Tindakan Jika Ada Klaster PTM Terbatas

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera merespon dan bertindak cepat jika ditemukan klaster Covid-19 di sekolah selama

penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

“Tentu ini harus direspon dengan cepat oleh pemerintah daerah termasuk satgas dalam konteks melakukan *testing* dan *tracing*,” tegas Netty usai pertemuan Tim

Komisi IX Soroti Kebijakan Test PCR Petugas di Bandara Soetta

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhayati menyoroti beberapa hal mengenai kebijakan di Terminal kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, di antaranya adalah mengenai tes PCR dan penggunaan APD untuk pegawai di bandara. Pihaknya mendapati informasi test PCR untuk para petugas bandara dilaksanakan satu bulan sekali.

“Kami mengimbau (otoritas terkait) lebih sering lagi (melakukan PCR) untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Yang kedua, kami juga menginginkan tugas yang berhubungan dengan penumpang itu memakai APD. Walaupun memang bukan APD yang tertutup sekali seperti nakes, tetapi memakai pelindung diri,” kata Nurhayati dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Bandara Soekarno-Hatta, di Tangerang, Banten, Jumat (24/9).

Politisi PPP itu juga menemukan adanya kendala dalam validasi dokumen bagi pelaku perjalanan internasional. Menurutnya, terlalu banyak pos-pos validasi yang melelahkan bagi pelaku

perjalanan internasional yang sudah bepergian selama belasan jam. Ia berharap agar ada sistem yang bisa mengintegrasikan secara sederhana, namun tetap mengutamakan keamanan dan keselamatan agar dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX DPR RI Nur Nadlifah juga mengatakan hal yang senada. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut sepakat bahwa proses yang harus ditempuh oleh pelaku perjalanan Internasional dinilai melelahkan karena harus menempuh waktu yang cukup lama dan harus menghadapi proses validasi yang cukup panjang. Hal ini dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadi penyebaran Covid-19.

“Saya setuju dengan teman-teman bahwa prosesnya terlalu panjang, orang dari perjalanan jauh misalnya jalan 7-8 jam di pesawat, ada yang 12 jam. Begitu mendarat pasti lelah, *jetlag*, belum lagi menghadapi proses yang sangat panjang, belum lagi itu di waktu yang tidak pas. Kalau dari tim penanganan Covid-19 yang

di bandara ini tidak ada mekanisme yang sederhana, justru di situ pada saat orang lelah, imunitas turun menjadi (potensi) tempat terinfeksi (Covid-19). Saya sepakat bahwa harus cepat iya, tapi tidak harus *ribet*, mungkin ini bisa lebih disederhanakan,” saran Nur Nadlifah. ■ [ais/es](#)

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhayati.
Foto: Aisyah/nvl



Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani saat pertemuan Tim Kunspek Komisi IX DPR RI dengan Sekda Jawa Barat. Foto: Erman/nvl

Kunspek Komisi IX DPR RI dengan Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja beserta jajaran di Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/9).

Netty menyebutkan selain menerapkan protokol kesehatan (prokes) pada PTM terbatas, percepatan vaksinasi Covid-19 pada anak usia sekolah juga perlu dimasifkan kembali oleh pemerintah daerah. “Tentu yang harus dilakukan sasaran vaksinasi pada anak sekolah usia 12-17 tahun,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama,

Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti jika ada klaster PTM terbatas. Hal itu guna meminimalisir penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah.

“Salah satunya kita sesegera mungkin akan melakukan vaksinasi di usia 12 tahun. Kalau guru-guru sudah karena menjadi prioritas, tetapi anak-anak atau siswa-siswinya saya setuju ini juga perlu diperhatikan,” tegasnya. ■ [es](#)

Perkembangan Perpustakaan Digital Harus Menyesuaikan Kemajuan Zaman

Komisi X DPR RI memberikan perhatian khusus pada perkembangan perpustakaan digital yang harus menyesuaikan dengan kemajuan teknologi informasi. Ini merupakan tuntutan adanya perubahan paradigma dalam pembelajaran dengan *e-learning*. Dengan perkembangan *e-learning*, maka akan muncul sebuah jasa pelayanan informasi digital yang terintegrasi.

Hal ini ditekankan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Balai Layanan Perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (24/9). "Perkembangan perpustakaan digital bukan sekadar menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, tetapi karena tuntutan adanya perubahan paradigma dalam pembelajaran *e-learning*," papar Fikri.

Menurutnya, perpustakaan merupakan unit penunjang dalam dunia pendidikan, maka harus menyediakan sumber informasi elektronik bagi kebutuhan pemustaka yang beraktivitas dari rumah secara *online*.

Layanan perpustakaan yang semula dilakukan secara langsung, diubah menjadi layanan *online* untuk memperlancar dan memberikan kemudahan bagi pemustaka dan pustakawan. "Pustakawan dituntut kreatifitasnya untuk menciptakan inovasi baru dalam memberikan layanan *online* kepada pemustaka," ujar Anggota Fraksi PKS DPR RI ini.

Dia memaparkan, perpustakaan digital pada saat ini menjadi



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih bertukar cenderamata saat memimpin Kunspek Komisi XI DPR RI ke Balai Layanan Perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Foto: Eko/nvl

sebuah kebutuhan. Meskipun pada kenyataannya sebagian besar perpustakaan di Indonesia belum memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan teknologi informasi, sehingga harus ada strategi khusus.

Ada pun kendala yang dihadapi oleh sebagian besar perpustakaan biasanya adalah biaya. Pengembangan

perpustakaan dari bentuk konvensional ke bentuk digital memerlukan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu, diperlukan kerja sama antar perpustakaan dan pemakaian sumber secara bersama atau *resource sharing*, yang dalam hal tertentu, dapat menghemat dana namun dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber informasi. ■ eko/es

Komisi X Apresiasi Minat Baca Masyarakat Solo

Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira mengapresiasi tingginya minat baca masyarakat muda Solo, berdasar laporan yang disampaikan Dinas Perpustakaan



Foto bersama dan pertukaran cenderamata Tim Kunspek Komisi X DPR RI dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka beserta jajaran. Foto: Tari/nvl

Pustakawan Berperan Penting pada Perpustakaan Era Digital



Foto bersama Tim Kunspek Komisi X DPR RI di Perpustakaan Sumut. Foto: Runi/nvl

Keberlangsungan perpustakaan di era digital perlu adanya dukungan dari para pustakawan dan tenaga perpustakaan yang handal dan profesional di bidangnya, guna mensosialisasikan ke masyarakat seberapa penting peranan perpustakaan di era digitalisasi saat ini.

Akan tetapi, kata Anggota Komisi X DPR RI Desy Ratnasari, sangat

Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan Pengembangan Aset SDA Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumut, perwakilan pustakawan, komunitas literasi, dan organisasi profesi perpustakaan, di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (24/9).

Menurut Desy, hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Komisi X DPR RI untuk bisa berkolaborasi

disayangkan profesi pustakawan saat ini belum mendapatkan apresiasi terhadap kinerjanya sendiri.

“Dengan demikian Komisi X perlu mencari solusi bagaimana keinginan para pustakawan bisa terealisasi atau diwujudkan,” kata Desy saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dengan

dengan Perpustakaan Nasional guna bisa mencari jalan keluar demi mewujudkan aspirasi yang diinginkan pustakawan, di tengah anggaran Perpustakaan dari tahun ke tahun yang sangat kecil. “Untuk itu kami yang duduk di Komisi X akan mendorong peningkatan anggaran (Perpusnas), guna mewujudkan keinginan dari para pustakawan,” komitmen politisi PAN itu.

Di sisi lain, ia menilai komunitas masyarakat literasi menjadi tulang punggung dalam menggerakkan kegemaran membaca di tingkat masyarakat, salah satunya mengubah pola kebiasaan masyarakat yang awalnya melihat buku bacaan atau mengakses internet hanya untuk melihat games ataupun berita-berita secara audiovisual. “Ke depannya saya harapkan kegemaran membaca bisa betul-betul menjadi suatu hal yang penting bagi kehidupan masyarakat itu sendiri,” harap Desy.

Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan menilai keinginan para pustakawan yang menginginkan adanya tunjangan sertifikasi sangatlah wajar, karena profesi mereka termasuk pelayanan pendidikan, melayani anak didik ataupun masyarakat umum yang ingin membaca. Mereka mengemban tanggung jawab besar dalam hal peningkatan sumber daya manusia yang berkaitan dengan membaca atau gemar membaca.

“Saya kira pustakawan itu memegang peranan sangat penting, namun pada kenyataan sekarang seperti dikatakan dalam pertemuan kita, (pustakawan) bisa melakukan sertifikasi, tetapi tidak ada tunjangan profesi terhadap hal itu. Seharusnya jika sudah tersertifikasi berarti kita mengakui ke profesionalnya,” tandas Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI tersebut. ■ mri/sf

Daerah Solo. Menurutnya dalam kondisi pandemi saat ini yang membatasi mobilitas masyarakat penting bagi pemda untuk menyediakan fasilitas perpustakaan digital, agar masyarakat dapat mengakses literatur yang sudah digitalisasi dengan mudah dan ramah.

“Menurut laporan Dinas Perpustakaan Daerah Solo, minat baca terutama masyarakat muda itu tinggi, cuma sekarang (tinggal) bagaimana fasilitasnya perlu disiapkan untuk mereka. Dengan demikian minat baca tersebut dapat tumbuh dan berkembang

dengan baik perlu diimbangi dengan fasilitas digitalnya maupun akses yang memudahkan untuk semua golongan, dalam hal ini tentu perpustakaan itu,” jelas Andreas saat mengikuti Kunspek Komisi X DPR RI ke Solo, Jumat (26/9).

Politisi PDI-Perjuangan tersebut juga menginginkan masyarakat, khususnya pelaku seni dan penulis buku dapat memenuhi kebutuhan literaturinya melalui perpustakaan yang tersedia di Solo, walaupun ada internet di zaman modern ini, namun tidak dapat dipastikan kebenarannya. ■ mri/sf

BKSAP: Perlu Regulasi untuk Tutup Segala Bentuk Peluang Korupsi

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menyampaikan bahwa *bribery* (suap) yang kerap terjadi turut melibatkan pihak swasta. Sehingga menurut Fadli Zon perlu ada regulasi yang bisa membuat institusi menutup segala potensi suap itu sendiri, sehingga seseorang tidak mudah melakukan suap.

“Kadang-kadang penyuapan itu terjadi karena ada peluang, misalnya peluang perizinan, dengan dibuatnya perizinan *online* itu akan mengurangi potensi atau peluang melakukan korupsi. Begitu juga perizinan-perizinan

juga harus transparan, biasanya perizinan itu kan dari korporasi, dari pihak swasta dan lain-lain,” ungkap Fadli Zon usai kegiatan Webinar *Enforcing Measures to Combat Bribery: Comparative Analysis on the Anti-Bribery Legislations (UK and Southeast Asia)*, di Bogor Jawa Barat, Kamis (23/9).

“Jadi menurut saya, secara institusi harus dibuat sistem yang mempersulit orang untuk melakukan tindakan korupsi. Banyak undang-undang kita yang perlu ada konsolidasi dari undang-undang yang ada sampai KUHP di dalam kitab hukum induk. Dengan begitu, kita mempunyai pendekatan

yang terintegrasi (holistik). Kita ingin memberantas korupsi, juga menghapus peluangnya,” tambah politisi Partai Gerindra tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyatakan bahwa kasus korupsi merupakan bagian signifikan kejahatan korupsi. Survei menunjukkan pada 2020 diperkirakan 1 dari 5 orang yang menggunakan layanan publik di Asia membayar suap. “Fenomena ini menyebabkan dampak kerusakan serius terhadap pembangunan ekonomi,” tegas Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI itu.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Kemitraan, Laode M Syarif menerangkan, saat dirinya menjabat Pimpinan KPK periode 2015-2019, kasus suap mendominasi sebagai kasus korupsi. Dari sekitar 700 kasus korupsi, 578 di antaranya adalah kasus suap. Pengaturan suap di berbagai negara di Asia Tenggara juga berbeda-beda. Di Singapura, korupsi masuk dalam bagian gratifikasi dan memiliki jangkauan yang serupa dengan Inggris.

“Ia juga berlaku untuk pejabat publik, pejabat publik asing, korporasi dan individu. Dan ini jauh berbeda dari hukum di Indonesia. UU tentang Tindak Pidana Suap jarang sekali digunakan di Indonesia,” terang Syarif. ■ skr/sf



Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon (kiri) bersama Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera (kanan) saat kegiatan menyampaikan paparan pada Webinar *Enforcing Measures to Combat Bribery: Comparative Analysis on the Anti-Bribery Legislations (UK and Southeast Asia)*. Foto: Singgih/nvl

Hafisz Tohir Optimis Ekonomi Global dan Nasional Akan Segera Bangkit

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad

Hafisz Tohir mengungkapkan, upaya mitigasi pandemi Covid-19 sangat diperlukan saat ini dalam peran serta keputusan yang diambil BKSAP DPR RI berdasarkan pada Resolusi PBB mengenai kerja sama internasional menghadapi Covid-19.

“Dimana fokus implementasinya pada revitalisasi SDG’s (Sustainable Development Goals), karena pandemi Covid-19 berdampak pada setiap sektor. Selain sektor kesehatan, ekonomi adalah sektor yang paling terdampak akibat pandemi ini,” tutur Hafisz dalam acara Forum Komunikasi dan Sosialisasi Program Kerja DPR RI dengan tema ‘Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPR di Tengah Pandemi’ bersama Koordinator Wartawan Parlemen, di Bandung, Jawa Barat Jumat (24/9).

Menurut politisi PAN ini, terdapat dua hal yang diingatkan Sekretaris Jendral (Sekjen) PBB. Pertama, pandemi Covid-19 menjungkirbalikkan tatanan kehidupan manusia. Pandemi Covid-19 juga memicu resesi global yang sangat parah. “Untuk itu perlu penguatan solidaritas, sinergi, dan kolaborasi antar masyarakat pada skala global dan nasional,” sambung Hafisz.

Hafisz menjelaskan, pada pertemuan BKSAP DPR RI dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam *Virtual Exchange with the Authors of The 2021 Economic Survey of Indonesia* di Tangerang sebelumnya,

disampaikan bahwa ada tiga kelompok besar yang penting untuk diperhatikan, dimana salah satunya adalah Kinerja makro ekonomi.

OECD menilai, kenaikan Defisit APBN 2020 sebesar 6,14 persen akan menjadi beban ke depan jika tidak dikontrol dengan baik. “Selain itu juga perlu diperhatikan *Tax Ratio* yang terus mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19.

Untuk itu perlu kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal ke depan,” sebut Hafisz.

Lebih lanjut legislator daerah pemilihan Sumatera Selatan I itu berpendapat di tengah tatanan dunia yang semakin terkoneksi, tidak dipungkiri suatu isu global memiliki dampak hingga ke tataran lokal masyarakat. Oleh karena itu, menurutnya, melalui keterlibatan dalam diplomasi parlemen, dirinya memiliki kesempatan untuk memperkenalkan dapil miliknya juga ke dunia Internasional.

“Sebaliknya pula, saya dapat memperjuangkan isu-isu global yang apabila tidak dikomunikasikan akan membawa dampak bagi dapil saya. Satu contoh, isu kelapa sawit Indonesia yang mendapatkan tekanan di Uni Eropa. Diperkirakan lahan sawit di dapil saya



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Achmad Hafisz Tohir. Foto: Jaka/nvl

mencapai 1,2 juta hektar dan industri sawit merupakan industri padat karya. Dalam courtesy call dengan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, saya sampaikan mengenai data dan fakta sawit Indonesia,” imbuh Anggota Komisi XI DPR RI tersebut. ■ tn/sf

RUU Landas Kontinen Optimalikan Kepentingan Nasional

Rancangan Undang-Undang (RUU) Landas Kontinen yang sedang dirumuskan DPR RI diproyeksikan untuk mengoptimalkan kepentingan nasional di laut. Namun, RUU usulan pemerintah ini diupayakan pula tidak melanggar hukum internasional, terutama beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Landas Kontinen Taufik Basari mengemukakan hal tersebut usai menggelar pertemuan dengan para akademisi Universitas Padjadjaran (Unpad), di Bandung, Jawa Barat, Kamis (23/9). RUU ini kelak mengatur semua yang bisa dilakukan Indonesia atas



RUU INI KONSEKUENSI DARI KITA MERATIFIKASI UNCLOS 1982. SUDAH ADA UU NOMOR 1 TAHUN 1973 YANG KITA MILIKI DAN TIDAK BISA LAGI KITA PEDOMANI, KARENA KITA INGIN MENGATURNYA DALAM UU BARU.



Wakil Ketua Pansus RUU Landas Kontinen Taufik Basari. Foto: Husen/nvl

sumber daya lautnya sepanjang tak melanggar *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 atau hukum laut internasional yang pernah diratifikasi Indonesia.

“Hanya negara-negara tertentu yang punya landas kontinen dan Indonesia di antaranya. Karena berhubungan dengan batas wilayah dan hak berdaulat di laut, maka kita harus bisa membuat norma UU yang sesuai dengan hukum internasional tapi juga bisa kita manfaatkan secara optimal untuk kepentingan nasional,” pandang Taufik.

Delegasi Pansus RUU Landas Kontinen berada di Unpad, Bandung, untuk mendapatkan perspektif para akademisi dan peneliti, apa saja yang harus dikoreksi dari naskah akademik RUU ini sekaligus kebutuhan regulasi

yang urgen di landas kontinen Indonesia. Taufik mengatakan, saat ini, Indonesia sendiri sudah memiliki UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia yang masih berlaku. Namun, regulasi ini perlu segera direvisi karena banyak persoalan mutakhir dan kontemporer yang perlu diakomodir.

“RUU ini konsekuensi dari kita meratifikasi UNCLOS 1982. Sudah ada UU Nomor 1 Tahun 1973 yang kita miliki dan tidak bisa lagi kita pedomani, karena kita ingin mengaturnya dalam UU baru. Dengan UU baru nanti, apa saja yang bisa kita lakukan di landas kontinen yang kita miliki. Ada hak berdaulat di landas kontinen, seperti hak eksplorasi dan eksploitasi yang harus kita atur sedemikian rupa,” seru politisi Partai NasDem tersebut. ■ mh/sf

BURT Kunjungi RS *Provider* Jamkestama di Purwakarta



Wakil Ketua BURT DPR RI Evita Nursanty saat memimpin Tim Kunker BURT bertukar cenderamata dengan manajemen RS Radjak Hospital. Foto: Agung/nvl

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja ke Rumah Sakit Radjak Hospital, Purwakarta, Jawa Barat. Wakil Ketua BURT DPR RI Evita Nursanty mengatakan, kunjungan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara langsung kesiapan, mekanisme pelayanan serta kendala yang dihadapi rumah sakit *provider* asuransi Jasindo dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya.

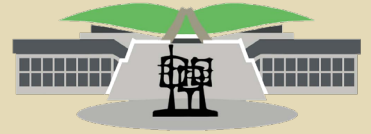
“Selain itu asuransi Jasindo melalui rumah sakit *provider*-nya diharapkan dapat memastikan program jaminan

pemeliharaan kesehatan dilaksanakan secara optimal dan sesuai peraturan,” terang Evita saat memimpin pertemuan Tim Kunker BURT dengan manajemen RS Radjak Hospital di Purwakarta, Jabar, Selasa (28/9).

Sebagaimana diketahui, pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) telah diatur dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2014. Ditambah pula aturan pelaksanaannya Permenkes Nomor 55 Tahun 2014 dan Permenkeu Nomor 167/PMK/02/2014. Adapun Evita mengatakan bahwa dari hasil pemaparan dan peninjauan tim BURT, rumah sakit yang

menjadi *provider* asuransi Jasindo kali ini dinilai cukup memadai fasilitasnya.

“Kami lihat fasilitasnya sudah cukup dan untuk *emergency* pun memadai. Kami harapkan kerja sama Jasindo dengan rumah sakit dapat berjalan dengan baik sehingga ke depannya pelayanan akan terus optimal,” sebut legislator dapil Jawa Tengah III tersebut. Selain itu, Evita juga mengatakan pihaknya mengapresiasi kinerja RS Radjak Hospital yang turut berkontribusi menangani pandemi, dimana saat ini pasien Covid-19 sudah mencapai angka 0 dan tenaga kesehatan di rumah sakit bersiap untuk *booster* vaksin berikutnya. ■ ah/sf



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani meninjau vaksinasi Covid-19 secara *door to door* bersama Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan yang diselenggarakan oleh BIN di RW 11, Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (29/9). Foto: Eno/nvl



Komisi XI DPR RI dan pemerintah sepakat membawa Rancangan Undang-Undang perubahan Kelima atas Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) untuk disetujui pada Rapat Paripurna DPR RI, usai raker dengan Menkeu RI di Gedung DPR RI, Senayan, Rabu (29/9). Foto: Oji/nvl



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar bersama Pimpinan BURT DPR RI dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Setjen DPR RI dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tentang Pelayanan Jasa Angkutan Udara di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (29/9). Foto: Runi/nvl